

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Ahmad Yani No 14 Muara Enim
Telp/Fax. (0734) 424690 & 421175

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT.karena hanya dengan perkenannya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim atas pelaksanaan program dan kegiatannya selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi paparan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data sehingga diyakini telah memenuhi prinsip prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bak dan bersih (good governance and clean good governance)

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim



Ardian Anfanardi, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197407201993111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Gambaran umum Dinas Kominfo SP Kabupaten Muara Enim.....	4
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim	4
1.4.2 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada	8
1.6 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategis Issued).....	10
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	14
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	16
2.4 Perjanjian Kinerja	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	21
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu	22
3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	23
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.....	23

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	78
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	79
3.2 Realisasi Anggaran	97
BAB IV PENUTUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Diskominfo SP Kabupaten Muara Enim.
Tabel 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) Diskominfo SP berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, indikator kinerja Diskominfo SP Kabupaten Muara Enim
Tabel 2.2	Indikator kinerja utama Diskominfo SP Kabupaten Muara Enim
Tabel 2.3	Formulir perjanjian kinerja Diskominfo SP Kabupaten Muara Enim
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Tabel 3.5	Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi SPBE Pada Tahun 2024
Tabel 3.6	Predikat Indeks SPBE
Tabel 3.7	Skala Tingkat Kematangan
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi eksternal Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Tabel 3.9	Perbandingan Hasil Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim ahun 2019, 2021 dan Tahun 2022, 2023,2024
Tabel 3.10	Data koordinat sinyal lemah dan blank spot Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Tabel 3.11	OPD yang menerapkan aplikasi dalam pelayanan internal dan eksternal di Tahun 2024
Tabel 3.12	Target dan realisasi persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP
Tabel 3.13	Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Muara Enim
Tabel 3.14	Analisa atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

1. Adapun tujuan pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk :
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim, disusun berdasarkan beberapa Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi pemerintah ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem laporan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem laporan diawali dengan penyusunan rencana strategik yang

mendefinisikan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud laporan tahunan.

Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama laporan tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 mencakup hal-hal berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2022 dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi inspektorat, satuan polisi pamong praja, dinas, badan, kecamatan dan kelurahan, telah diubah lagi dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 tahun 2019, diubah lagi dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 tahun 2023 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1. Tugas Pokok :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

- c. Pengoordinasian Penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- d. Penyelenggaraan Pembinaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- f. Penyelenggaraan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi.

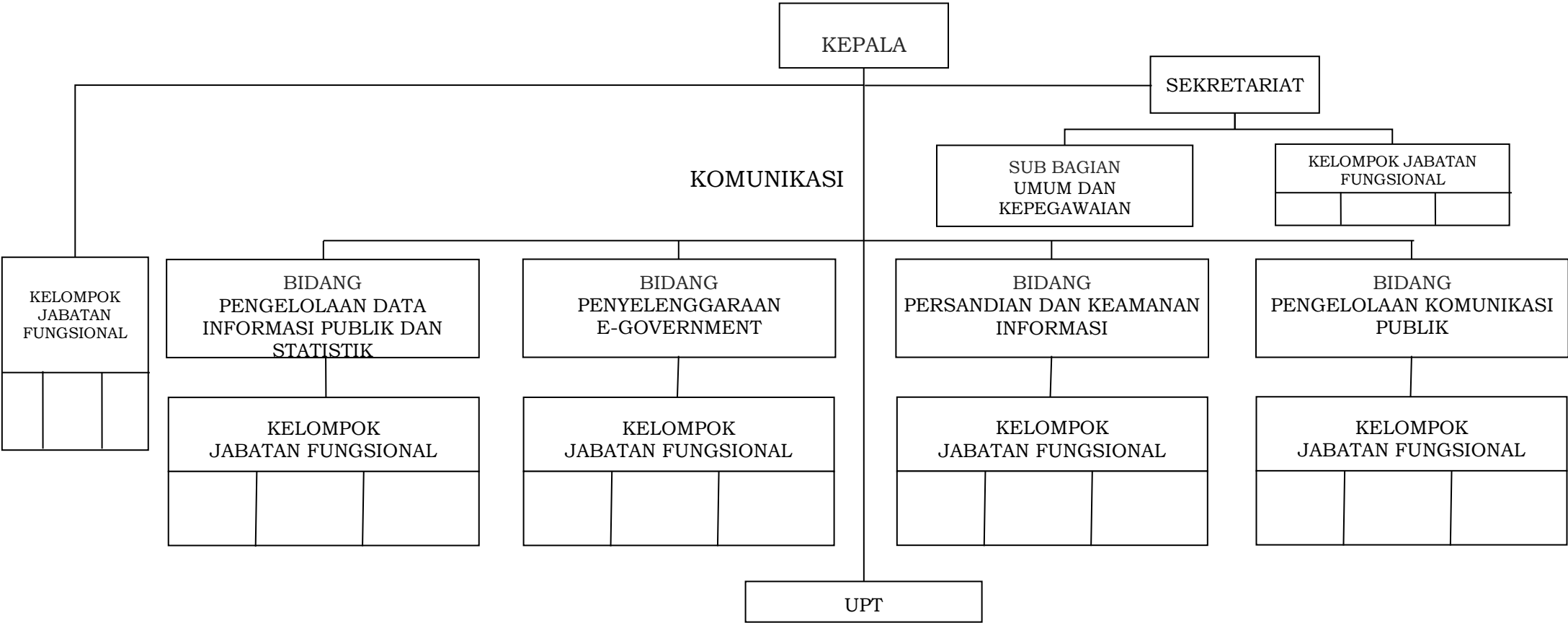
Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan pembangunan, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 tahun 2023, tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Substansi Perencanaan
 - Kelompok Substansi Keuangan
- 3. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Opini Publik
 - Kelompok Substansi Layanan Informasi Publik
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik
- 4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Kelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

- Kelompok Substansi Seksi Tata Kelola E-Government
5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi , membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi Persandian
 - Kelompok Substansi Tata Kelola Persandian
 - Kelompok Substansi Keamanan Informasi
6. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Kelompok Substansi Kemitraan Komunikasi Publik
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



1.5 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Komposisi ASN
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim**

Kedudukan dalam Organisasi		Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1		2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
Jabatan Fungsional :				
-	Perencana Muda Sub-koordinator Perencanaan	-	1	1
-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sub-koordinator Keuangan	-	1	1
Jabatan Pelaksana :				
-	Analisis Pelaporan Keuangan		1	1
-	Pengadministrasian Kepegawaian	1	-	1
-	Verifikator Keuangan	1	-	1
P3K :				
	Terampil Pranata Komputer		1	1
3.	Kabid Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik	1	-	1
Jabatan Fungsional :				
-	Pranata Humas Muda Sub-koordinator Pengelolaan Opini Publik	1	-	1
-	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub-koordinator Layanan Informasi Publik	-	-	-

-	Statistisi Muda Sub-koordinator Pengelolaan Data dan Statistik	-	1	1
	Jabatan Pelaksana :			
-	Analisis Statistik		2	2
-	Analisis Data dan Informasi	1	-	1
-	Analisis Penyuluhan dan layanan Informasi	1	-	1
4.	Kabid Penyelenggaraan E-Government	1	-	1
	Jabatan Fungsional :			
-	Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Infrastruktur TIK	-	-	-
-	Pranata Komputer Muda Sub-koordinator Tata Kelola E- Government	1	-	1
	Jabatan Pelaksana :			
-	Pengawas Teknologi Informasi	1	-	1
-	Teknisi jaringan Instalasi	1	-	1
-	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi		1	1
	P3K			
-	Ahli Pertama Pranata Komputer	2	-	2
5.	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	-	1	1
	Jabatan Fungsional :			
-	Sandiman Muda Sub-koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian	-	1	1
-	Manggala Informatika Muda Sub-koordinator Keamanan Informasi	1	-	1
	Jabatan Pelaksana :			
-	Analisis Persandian	1	-	1
6.	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	1	-	1
	Jabatan Fungsional :			
-	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Sub-Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	1	1
-	Pranata Siaran Muda Sub-koordinator Kemitraan Komunikasi Publik	-	1	1
-	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Sub-koordinator Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik	1	-	1
	Jabatan Pelaksana :	-	-	-
-	Analisis Publikasi	-	1	1

-	Analisis Kemitraan	-	1	1
-	Fasilitator Pemerintahan	1	-	1
	P3K			
	Terampil Pranata Komputer	1	-	1
Jumlah		21	14	35

**Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Pangkat/Golongan**

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Gol (orang)													P3K	Jlh (org)
	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	- -		
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
S2	-	1	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
S1	-	-	-	1	5	5	3	3	-	-	-	-	-	2	19
Akademi/DIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Jumlah		1	1	3	10	6	3	4	-	3	-	-	-	4	35

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 tahun 2022 terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2023 bertugas menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, serta persandian dan statistik. Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim ke depan, yang menonjol lebih

menitikberatkan pada pembentukan kabupaten Muara Enim menjadi kota cerdas (*smart city*).

Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud sebagai berikut :

1. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana TIK

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mengubah sistem pelayanan publik secara bertahap dari semula bersifat manual menjadi layanan berbasis TIK. Sistem pelayanan publik berbasis TIK pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur. Lebih jauh, pelayanan publik berbasis TIK meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sistem yang ada sejauh ini masih terkendala dalam penyediaan sarana dan prasarana TIK. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan sistem pelayanan publik menjadi tidak optimal.

2. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

3. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat.

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk

di Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

4. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan terhadap informasi rahasia menjadi kegiatan untuk mengamankan informasi dan aset informasi secara keseluruhan. Persandian menjamin keamanan e-Government dan mendukung keamanan pembentukan ekosistem kota cerdas. Keamanan informasi perlu mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat. Hal ini memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pemanfaatan mobile internet, cloud computing, internet of things, big data analytics dan artificial intelligence.

5. Data yang beragam dan belum terintegrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan akan selalu membutuhkan data statistik untuk menerangkan kondisi dan hasil capaian keberhasilan pembangunan di kabupaten.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Pada dasarnya laporan kinerja ini merupakan pencapaian kinerja D Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja tahun 2024 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2024 ini.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim untuk periode 2024-2026 dan rencana kinerja untuk tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Sehubungan dengan adanya perubahan status dari Kantor Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 31 tahun 2016 dan telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 tahun 2022 terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 tahun 2023 tentang tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 3 tahun.

Selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) per tahun.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim yaitu:

a. Tujuan

Meningkatkan sitem pemerintahan berbasis elektronik

b. Sasaran

- Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- Meningkatnya keterbukaan informasi

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
		Meningkatnya keterbukaan informasi	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

2.3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Penyelenggaraan E-Government - Laporan Bidang Persandian
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan Bidang Penelolaan Data Informasi Publik dan Statistik - Laporan kegiatan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

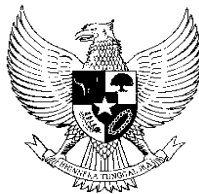
2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, dokumen Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :



BUPATI MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Arifanardi, AP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henky Putrawan

Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI MUARA ENIM

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM

HENGKY PUTRAWAN

ARDIAN ARIFANARDI, AP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197407201993111001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tahun
 Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.	Indeks SPBE	3,00
2	Meningkatnya keterbukaan informasi	2.	Persentase informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 7.781.492.640	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 11.387.992.250	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 428.423.800	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 418.920.200	

Pj. BUPATI MUARA ENIM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM

HENKY PUTRAWAN

ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197407201993111001

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 yang telah disepakati. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

* Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim beserta target dan capaian realisasinya.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	% Capaian	Kriteria /Kode
1	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.1	Indeks SPBE	3,00	3,29	100%	Sangat Baik
	Meningkatnya keterbukaan informasi	1.2	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	100%	100 %	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian pada tahun 2024 terealisasi 100%. Pencapaian realisasi Indeks SPBE 2024 diukur berdasarkan standar penilain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024.

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Kriteria/ kode
		Targ et	Realis asi	% Capai an	Targ et	Realis asi	% Capa ian	Targ et	Realis asi	% Capai an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18
1	Indeks SPBE	2,95	2,91	98,64	3,00	3,00	100	3,00	3,29	109,66	Sangat Baik
2	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	80%	100%	100 %	80%	100%	100 %	80%	100%	100 %	Sangat Bai

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian pada tahun 2024 terealisasi 109,66% meningkat dibandingkan dengan capaian di tahun 2023. Pencapaian realisasi Indeks SPBE diukur berdasarkan hasil evaluasi eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB).

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi dan Standar Nasional

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target/ Realisasi Kinerja OPD			Target/Realisasi Provinsi			Target/ Realisasi Nasioanal			Kriteria/ kode
		Target	Realisa si	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5				6	7	8	9
1	Indeks SPBE	3,00	3,29	109,66%	2,8	3,00	107,14	2,60	3,12	104%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas bahwa untuk realisasi kinerja pada tahun 2024 untuk nilai indeks SPBE yang ditargetkan sebesar 3,00 dan terealisasi 3,29 lebih tinggi di bandingkan dengan realisasi nilai provinsi dengan capaian 3,12 dan lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional dengan target nasional yang ditetapkan 2,60 realisasi sebesar 3,12.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

Indeks SPBE.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan dalam mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE tersebut.

Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 54/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

2. pengkoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
4. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
5. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Program kerja yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Mengelar rapat koordinasi tim koordinator SPBE tahun 2024
2. Mengikuti SPBE SUMMIT tahun 2024 secara daring.
3. Mengikuti peluncuran SIA SPBE v2 secara daring.
4. Mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis SIA SPBE v2 yang dilakukan oleh Kemenpan RB.
5. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE tahun 2024;
6. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE tahun 2024;
7. Melakukan koordinasi teknis bersama Kemenpan RB terkait pendampingan/narasumber kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* dan Peta Rencana SPBE;
8. Menyusun dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Menyusun dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
10. Melakukan Sosialisasi Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.

11. Melakukan *Final Meeting* Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.
12. Melakukan koordinasi teknis bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait persiapan Audit Aplikasi dan Infrastruktur TIK;
13. Mengikuti Sosialisasi secara daring Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024;
14. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024;
15. Mengikuti Penilaian interviu pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

Meraih indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,29 yang merupakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilakukan Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan K/L/D dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE. Proses penilaian dilakukan dengan metode tertentu oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE, dimana evaluator terdiri dari evaluator internal yakni evaluator yang ditetapkan melalui Kepala K/L/D/Pemkab/Kota dan evaluator eksternal yakni evaluator yang ditetapkan oleh Menteri \Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kegiatan untuk melakukan sebuah penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pemerintah. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE adalah sebagai berikut :

- Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE.
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Menjamin kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Evaluasi SPBE

2. Penilaian Mandiri
3. Penilaian Dokumen
4. Penilaian Interviu
5. Penilaian Visitasi (Kab/Kota terpilih)

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2024 diawali dengan Sosialisasi dibulan Juli, kemudian Penilaian mandiri SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilaksanakan di bulan Juli s/d Agustus dan mengikuti tahapan penilaian interviu dibulan September. Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak mengikuti penilaian visitasi.

Tabel 3.5. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi SPBE Pada Tahun 2024

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Evaluasi SPBE	16 – 18 Juli 2024
2.	Penilaian Mandiri	17 Juli s/d 18 Juli 2024
3	Penilaian Dokumen	19 – 20 September 2024
4.	Penilaian Interviu	25 September – 15 Oktober 2024
5.	Penilaian Visitasi (Kab/Kota terpilih)	November

Adapun standar penilaian dalam mengukur indeks SPBE yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan

2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi internal SPBE tahun 2024 di lingkungan pemerintah kabupaten muara enim dilaksanakan oleh tim asessor internal yang ditetapkan melalui SK Bupati nomor 55/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Tim Asessor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Lingkup Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- 2) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- 3) melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

dengan rincian substansi indikator penilaian sebagai berikut :

No	Nama Domain		Jumlah Indikator	Bobot (100%)
1	Kebijakan internal SPBE		10	13% (@1,3%)
2	Tata Kelola SPBE		10	25% (@2,5%)
3	Manajemen SPBE		11	16,5% (@1,5%)
4	Layanan SPBE		16	45% (@2,75%/@3%)

Tabel 3.7. Skala Tingkat Kematangan

Skala	Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Layanan
1	Rintisan	Informasi
2	Terkelola	Interaksi
3	Terdefinisi	Transaksi

4	Terpadu dan Terukur	Kolaborasi
5	Optimum	Optimum

Berdasarkan Hasil evaluasi eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat nilai Indeks SPBE yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Hasil Evaluasi eksternal Penyelenggaraan SPBE
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024

Indeks SPBE	3.29
Domain	Indeks
Domain Kebijakan SPBE	4.30
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
Domain Manajemen SPBE	1.36
Domain Layanan SPBE	3.75

Tabel 3.9.
Perbandingan Hasil Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan SPBE
Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,91	3.00	3,29
Domain	Indeks	Indeks	Indeks
Kebijakan	3,40	3.70	4.30
Tata Kelola	2,60	2.70	3,20
Manajemen	1.00	1.18	1.36
Layanan	3.64	3.63	3.75

Berdasarkan standar penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,29 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2023 yang nilai indeksnya 3,00,

Peningkatan nilai indeks tersebut salah satunya didorong oleh disusunnya arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe yang merupakan amanat dari perpres 95 tahun 2018 tentang spbe dan perpres 132 tentang arsitektur spbe nasional.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi, diharapkan laporan hasil evaluasi (LHE) SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE di Kabupaten Muara Enim, didukung dengan adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam rangka upaya memperluas cakupan pembangunan infrastruktur digital yang dapat dinikmati secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Muara Enim, peran infrastruktur telekomunikasi dalam meningkatkan tingkat teledensitas sangatlah penting untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa metro ethernet untuk

kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan Fonya dan sampai dengan tahun 2022 ini masih sewa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan sewa jaringan Online/Internet/ Bandwidth internet dengan kecepatan 600 Mbps, sewa collocation untuk back up data center yang ada di nix data center jakarta dan batam. Untuk daerah yang sebelumnya tdak ada sinyal internet, di tahun 2024 ini telah dilakukan akses internet untuk desa blankspot dengan menggunakan jaringan Via Vsat, adapun data desa blank spot dan lemah sinyal disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.

DATA KOORDINAT SINYAL LEMAH DAN BLANKSPOT KABUPATEN MUARA ENIM 2024

Desa	Longitute	Latitutde	Kecamatan	Keterangan
Swarna Dwipa	103,4535	-4,15099	Semende Darat Tengah	Tidak ada sinyal
Rekimai Jaya	103,47848	-4,13779	Semende Darat Tengah	Tidak ada sinyal
Gunung Agung	103,51594	-4,14626	Semende Darat Tengah	Tidak ada sinyal
Segamit	103,51791	-4,21505	Semende Darat Ulu	Sinyal Lemah
Tanjung Agung	103,58488	-4,19893	Semende Darat Ulu	Sinyal Lemah
Danau Gerak	103,5174	-4,2638	Semende Darat Ulu	Sinyal Lemah
Pelakat	103,54759	-4,26013	Semende Darat Ulu	Sinyal Lemah
Tanjung Tiga	103,58931	-4,25841	Semende Darat Ulu	Sinyal Lemah
Palak Tanah	103,5803	-4,16848	Semende Darat Tengah	Sinyal Lemah
Kota Agung	103,58155	-4,1677	Semende Darat Tengah	Sinyal Lemah
Muara Tenang	103,58218	-4,16732	Semende Darat Tengah	Sinyal Lemah
Tebing Abang	103,58226	-4,15128	Semende Darat Tengah	Sinyal Lemah
Penindaian	103,64225	-4,16802	Semende Darat Laut	Sinyal Lemah
Batu Surau	103,58592	-4,1434	Semende Darat Tengah	Sinyal Lemah
Muara Danau	103,60706	-4,0981	Semende Darat Laut	Sinyal Lemah
Babatan	103,6739	-4,09762	Semende Darat Laut	Sinyal Lemah
Karya Nyata	103,66434	-4,05713	Semende Darat Laut	Sinyal Lemah
Pagar Agung	103,62532	-4,03672	Semende Darat Laut	Sinyal Lemah
Ramai Pasai	103,833105	-3,43789	Benakat	Sinyal Lemah
Pagar Dewa	103,83138	-3,432877	Benakat	Sinyal Lemah
	103,82822	-3,43121		
	103,83277	-3,43185		
Betung	103,82961	-3,428715	Benakat	Sinyal Lemah
	103,830786	-3,4276853		
	103,829527	-3,427132		

Padang Bindu (Dusun Belanti)	103,774055	-3,348552	Benakat	Sinyal Lemah
Hidup Baru	103,802124	-3,379331	Benakat	tidak ada sinyal
Sugih Waras	103,78145	-4,04786	Panang Enim	Signal Lemah
Lubuk Nipis	103,7523	-4,03363	Panang Enim	Signal Lemah
Tanjung Baru	103,79641	-4,01327	Panang Enim	Signal Lemah
Embawang	103,79088	-3,97616	Panang Enim	Signal Lemah
Tanjung Agung	103,80143	-3,93084	Tanjung Agung	Signal Lemah
Gurinam	104,06376	-3,4444	Rambang Niru	Signal Lemah
Air Limau	104,09881	-3,42659	Rambang Niru	Tidak ada sinyal
	104,10886	-3,43591		
Aur Duri	103,97574	-3,60409	Rambang Niru	Signal Lemah
	103,9828	-3,5737	Rambang Niru	tidak ada sinyal
Cek Dam	103,98065	-3,49693	Rambang Niru	Signal Lemah
Belimbing Jaya	103.98098	-03.44569	Belimbing	Sinyal Lemah
Belimbing Dalam	103.99034	-03.4804	Belimbing	Sinyal Lemah
Bulang	103.99240	-03.42624	Belimbing	Sinyal Lemah
Darmo Kasih	103.97827	-03.42835	Belimbing	Sinyal Lemah
Dalam	104.012359	-03.425470	Belimbing	Sinyal Lemah
Kuripan Selatan	104.06202	-03.50805	Empat Petulai Dangku	Sinyal Lemah
Kahuripan Baru	104.0816	-03.41812	Empat Petulai Dangku	Sinyal Lemah
Pangkalan Babat	104.07845	-03.40039	Empat Petulai Dangku	Sinyal Lemah
Gunung Raja	104.09991	-03.40039	Empat Petulai Dangku	Sinyal Lemah
Dangku	104.09130	-03.37880	Empat Petulai Dangku	Sinyal Lemah
Karang Sari	104.17312	-03.74712	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Sumber Asri	104.10062	-03.85901	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Prabu Menang	104.09579	-03.86146	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Pagar Dewa 1	104.15409	-03.82239	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Pagar Dewa 2	104.16561	-03.84665	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Lubai Makmur	104.16561	-03.84665	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Mekar Jaya	104.03558	-03.89873	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Sumber Mulia	104.12964	-03.80993	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Karang Mulia	104.16659	-03.77265	Lubai Ulu	Sinyal Lemah
Mulia Abadi Dusun 2	104.54221	-03.09124	Muara Belida	Sinyal Lemah
Kayu Ara Batu	104.50229	-03.09308	Muara Belida	Tidak ada sinyal

Sumber : Laporan Tahunan Bidang E-Government tahun 20224

Dari tabel di atas, terdapat beberapa desa yang tidak ada sinyal, untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2024 ini telah dianggarakan sewa internet via Visat yang disalurkan di Kantor Kepala Desa Masing-masing untuk mendukung kelancaran administrasi pelayanan kepada masyarakat

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan sewa internet Via V-Sat untuk desa pariwisata yang beralokasi di :

1. Desa Bedegung yang merupakan wisata air terjun curup tenang
2. Desa Karya Mulia yang merupakan wisata kampung melaka
3. Desa Sumber Rahayu yang merupakan wisata betung berseri
4. Desa Pinang Banjar merupakan Wisata air
5. Desa Ujan Mas Baru merupakan wisata air danau emas

Akses internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan jaringan fiber optik sendiri dengan menyewa bandwidth dari PT. Jala Lintas Media/JLM. Pusat operasi jaringan dari provider tersebut terhubung melalui fiber optic ke dua lokasi yaitu :

1. NOC 1 DISKOMINFO
2. NOC 2 KANTOR BUPATI MUARA ENIM

2 Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saat ini organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah tengah melakukan manajemen dan pengelolaan instansi pemerintah untuk membangun budaya teknologi informasi yang baik, agar solusi teknologi menjadi maksimal. Menjadi solusi teknologi, kini pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pelayanan publik salah satunya dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini sudah menjadi program penting yang bersifat mendesak, sehingga pelaksanaan penerapan SPBE merupakan alat utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan visi SPBE yaitu “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi”. Proses birokrasi berbasis digital yang elementer menjadi prioritas dilakukan demi terwujudnya hasil dan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis serta didukung oleh budaya birokrasi yang berintegritas yang tinggi. Dengan demikian, pembangunan dan

penerapan SPBE instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.

Hal tersebut di atas tentunya menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat, instansi pemerintah, maupun ASN. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional kemudian menjadi acuan dalam penerapan SPBE khususnya dalam pengintegrasian proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi serta layanan pemerintah yang sistematis secara nasional. Untuk itu diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim yang telah diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan nilai indeks SPBE Pemkab muara enim menyusun arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe yang merupakan amanat dari perpres 95 tahun 2018 tentang spbe dan perpres 132 tentang arsitektur spbe nasional. kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe Pemkab muara enim didampingi oleh tim narasumber dari kementerian rb sebanyak 3 orang. kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be diawali dengan melakukan reviu dan evaluasi terhadap arsitektur spbe as-is Pemkab muara enim yang dilakukan bersama antar tim internal Pemkab dan tim narasumber. selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe Pemkab muara enim kepada 40 unit kerja lingkup Pemkab muara enim yang dilakukan oleh tim narasumber. kemudian setelah itu dilakukan pendampingan penyusunan kepada para pic spbe unit kerja melalui daring dan luring mengenai tata cara penyusunan/penginputan data di SIA SPBE.

Dalam mendukung program penyusunan Arsitektur Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan kegiatan evaluasi mandiri SPBE dan Penyusunan SPBE dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE. Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 54/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Tim Koordinasi SPBE yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
2. Pengkoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
4. Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
5. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
6. Pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Program kerja yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Mengelar rapat koordinasi tim koordinator SPBE tahun 2024
2. Mengikuti SPBE SUMMIT tahun 2024 secara daring.
3. Mengikuti peluncuran SIA SPBE v2 secara daring.
4. Mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis SIA SPBE v2 yang dilakukan oleh Kemenpan RB.
5. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE tahun 2024;

6. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE tahun 2024;
7. Melakukan koordinasi teknis bersama Kemenpan RB terkait pendampingan/narasumber kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* dan Peta Rencana SPBE;
8. Menyusun dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Menyusun dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
10. Melakukan Sosialisasi Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.
11. Melakukan *Final Meeting* Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.
12. Melakukan koordinasi teknis bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait persiapan Audit Aplikasi dan Infrastruktur TIK;
13. Mengikuti Sosialisasi secara daring Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024;
14. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024;
15. Mengikuti Penilaian interviu pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan sistem informasi daerah/aplikasi merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan SPBE. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi aktifitas organisasi pemerintahan yang menerapkan e-Government, sehingga apabila layanan tersebut terhenti maka efeknya timbulnya berbagai resiko operasional.

Desain grafis merupakan salah satu pekerjaan kreatif yang banyak dibutuhkan oleh berbagai instansi maupun perusahaan. Saat ini, berbagai informasi dikemas dengan tampilan visual yang menarik, baik informasi berupa edukasi hingga promosi produk. Selain itu, ilustrasi visual yang dibuat juga memudahkan masyarakat untuk memahami informasi di dalamnya.

Untuk tahun 2024 telah dikembangkan 3 website/aplikasi yaitu :

1. Sitem informasi laporan jaringan (Silajang)
2. Muara Center
3. Website

Adapun tujuan dari Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik bertujuan yaitu:

a. Tujuan Umum

mempermudah proses desain dan konversike CSS dan HTML untuk mempercepat proses development website/aplikasi serta mencegah terjadinya kendala pada server yang sudah beroperasi.

b. Tujuan Khusus

1. Penggunaan aplikasi pengolah grafis untuk membuat desain yang menarik.
2. Konversi desain ke CSS dan HTML untuk mempersingkat proses development website / aplikasi.
3. Website template yang responsive dan User Interface (UI) yang lebih menarik serta User Experience (UX) yang lebih mudah dipahami.
4. Mengoptimalkan server sebagai sarana penyimpanan data.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada

Untuk menunjang kebutuhan dalam pengembangan aplikasi tersebut tahun anggaran 2024 telah dianggarkan belanja lisensi software yang dipergunakan untuk pembuatan desain visual, konversidesainke Cascading Style Sheet (css) dan Hypertext Markup Language (html) karena saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih menggunakan software trial dan software yang bersifat open source, hal ini kurang optimal dikarenakan adanya batasan fitur yang diberikan antara versi open source, trial dan lisensi berbayar. Pemeliharaan Server juga dianggap krusial karena mendukung aktifitas aplikasi yang ada di *Data Center Kominfo. Maintenance Data center* ini sendiri meliputi untuk memperbarui

operating system (OS), setting RAID server, membackup data, memperbarui versi aplikasi, mengaturstruktur direktori di server dan memastikan DNS berjalan. adapun aplikasi dalam pelayanan internal dan eksternal yang diterapkan oleh OPD di Kabupaten Muara Enim dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11.
DATA SISTEM ELEKTRONIK KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

No	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Organisasi Perangkat Daerah Pemilik/Pengguna	→ Instansi (Dependency)
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	SIMPEG terdiri dari beberapa fungsi yaitu e-Personal, Sistem informasi penyimpanan arsip kepegawaian, E-Kinerja, Peta Jabatan dan E-Presensi	Open Source	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
2	E-Presensi	digunakan para ASN/PPPK untuk melakukan absen	Open Source	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	InaRISK	Mengetahui Risiko Bencana di wilayah kita dan langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana	Open Source	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
4	Pusdalops PB (Pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)	Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.	Open Source	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
5	DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia)	Aplikasi Dibi menggunakan metode desinventar dalam pengumpulan, analisis data serta dampak bencana yang bersifat open source untuk menyimpan data kejadian, dampak dan penyebab bencana.	Open Source	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
6	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	mengolah informasi data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan melakukan pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.	Open Source	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

7	e-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat, Menghasilkan data transaksi BPHTB dengan kualitas yang baik dan akurat dan Memiliki kecepatan dan kemudahan Wajib pajak dalam membayar BPHTB.	Open Source	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
8	9 Pajak Daerah Online	Dapat mempercepat dan mempermudah penyampaian data informasi pajak daerah. Pelaporan dan pembayaran pajak daerah lebih transparan dimana wajib pajak dapat secara langsung terhubung dengan sistem dan dalam sistem tersebut dapat dilihat hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak daerah. Memberikan motivasi dan sebagai acuan kepada wajib pajak lainnya agar selalu tepat waktu melaporkan dan membayar pajak daerah.	Open Source	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
9	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	memudahkan pendaftaran pendataan hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pemohon	Open Source	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
10	Indeks Inovasi Daerah/Inovation Government Award (IGA)	Website digunakan untuk pemberian penghargaan bagi daerah yang telah menginputkan Indeks Inovasi Daerah untuk dilaporkan ke Kemendagri dan melihat evidence base dari masing-masing inovasi yang dilaporkan	Open Source	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
11	Sistem Informasi Layanan Perbendaharaan Online Muara Enim (SILPERLIME)	memudahkan penelusuran dokumen setelah dimasukan ke loket.	Open Source	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
12	Sistem Informasi Manajemen Daerah Aset (SIMDA ASET)	Manajemen aset yang ada di lingkup pemerintah kabupaten muara enim	Open Source	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
13	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI)	Untuk mempermudah pengelolaan gaji pns mulai dari pencetakan daftar gaji, potongan pihak ketiga, dan monitoring pegawai sampai batas pensiun	Open Source	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
14	Bank Data Infrastruktur	Website Bank Data Infrastruktur dirancang sebagai sarana keterbukaan informasi perencanaan	Open Source	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

15	E-SAKIP Kabupaten Muara Enim	Aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendukung tata kelola pemerintah berbasis elektronik dan Good Government	Open Source	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
16	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Menyediakan layanan untuk menginput perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah	Open Source	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
17	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	aplikasi ini berfungsi sebagai sistem yang mempermudah dalam pengurusan dokumen kependudukan. Semuanya ada 23 output, yang jika dikelompokkan menjadi 3 output utama, yakni dalam bentuk kartu, surat, dan akta. Berupa kartu ada 3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Berupa surat ada 14 yaitu Surat Keterangan Pindah, Surat keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Berupa akta ada 6 yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak. Adapun Aplikasi juga bisa melayani produk layanan disdukcapil terbaru yaitu IKD (Identitas Kependudukan Digital)	Open Source	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
18	BEnroll	aplikasi ini berfungsi untuk merekam data penduduk baik itu berupa wajah (foto), tanda tangan, rekaman sidik jari maupun rekaman iris mata penduduk tersebut.	Open Source	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

19	BCard	aplikasi ini berfungsi untuk mencetak kartu tanda penduduk (KTP-EI) penduduk baik itu yang baru pertama kali cetak, penggantian elemen biodata maupun pencetakan karena hilang atau karena ingin melakukan penggantian foto maupun tanda tangan yang sudah ada pada biometrik sebelumnya	Open Source	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
20	Elektronik Puskesmas (ePuskesmas)	Pengembangan sistem pengelolaan data kesehatan untuk puskesmas demi mendapatkan data dan informasi dengan cepat	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
21	Komunikasi Data (Komdat) Kementerian Kesehatan	Mengumpulkan data dan informasi kesehatan secara berkala yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
22	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan	Meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
23	Rumah Sakit (RS) Online	Berfungsi untuk mendapatkan data tentang identitas rumah sakit, ketenagaan, rekapitulasi kegiatan pelayanan kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat inap dan kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat jalan	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
24	Dashboard JKN Pemerintah Daerah	Menyediakan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran atas kondisi kesehatan masyarakat di daerah, seperti cakupan kepesertaan program JKN di daerah, 10 diagnosa penyakit terbanyak di daerah, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan sebagainya	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
25	Tata Kelola Kesehatan Masyarakat (Talkesmas)	Untuk Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian indikator Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
26	Aplikasi Keluarga Sehat (IKS)	Untuk Pendataan Keluarga Sehat secara digital	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
27	Registrasi Fasyankes	Untuk pencatatan resmi fasyankes untuk memberikan kode fasyankes masing-masing	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

28	Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mendata fasyankes berupa SIO, Penanggung Jawab dan Pemilik	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
29	Indikator Nasional Mutu	Mendata laporan indikator mutu secara online dan nasional	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
30	Indikator Keselamatan Pasien	Mendata laporan keselamatan pasien fasyankes	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
31	Data Fasyankes Online	Data fasyankes online	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
32	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis (SIKELIM)	Memberikan kemudahan pelaporan limbah medis	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
33	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Kementerian Kesehatan	Meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai kebutuhan medis pasien dan kompetensi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
34	Telemedicine dan Konsultasi Medis Online (KOMEN) Kementerian Kesehatan	Layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka atau secara jarak jauh dalam rangka memberikan konsultasi diagnostik dan tata laksana perawatan pasien	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
35	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) SKDR	Memberikan informasi alert/sinyal terhadap penyakit yang berpotensi KLB	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
36	Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK)	Memberikan informasi data imunisasi rutin, baduta dan WUS	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
37	All record tc-19	Memberikan informasi data covid-19 kasus konfirmasi laboratorium, kasus sembuh dan meninggal	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
38	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)	Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB Sensitif, TB Resistan Obat, laboratorium dan logistik dalam satu platform yang terintegrasi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
39	Sistem informasi Treking untuk transportasi Spesimen (SITRUST)	Untuk pengiriman sampel TBC dari faskes ke Laboratorium	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
40	Elektronik TB (Etb) 12	Untuk pelaksanaan uji silang hasil pemeriksaan Slide TBC	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

41	Sistem informasi Hiv/aids (SIHA)	Pencatatan dan pelaporan HIV /AIDS	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
42	Sistem informasi Hepatitis dan Infeksi saluran perencanaan (SIHEPI)	Pecatatan dan Pelaporan Diare dan hepatitis B	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
43	Elektronik sistem informasi malaria (Esismal)	Pencatatan dan pelaporan Malaria	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
44	Sistem informasi pengendalian vektor (SILANTOR)	Pencatatan dan pelaporan penemuan jentik	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
45	Siformasi Arbovirosis (SIARVI)	Pencatatan dan pelaporan program DBD	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
46	PSC (Public Safety Center) 119 Kementerian Kesehatan	Menerima dan merespon laporan darurat dari masyarakat	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
47	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes Shar'i) Kemenkes RI	Untuk mempermudah pemantauan dan mendapatkan informasi tentang data kesehatan jemaah haji	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
48	Komunikasi Data (Komdat) Kementerian Kesehatan	Memberikan berbagai informasi statistik sektoral Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan Masyarakat	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
49	Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)	Memberikan informasi status gizi individu dan kinerja program gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
50	Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)	Memberikan informasi kasus kematian maternal dan perinatal serta kronologis kematiannya	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
51	Elektronik Kohort (e-Kohort)	Memberikan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
52	SISDMK	Memberikan informasi data kepegawaian tenaga kesehatan baik ASN maupun Non ASN	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
53	Renbut 4.0	Untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan perhitungan beban kerja pegawai sehingga dalam penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit dapat sesuai dengan kebutuhan.	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

54	SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan)	Data Sarana, Prasarana Fasyanfar, Tenaga Kefarmasian, Data Anggaran DAK untuk Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
55	PDGS	Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
56	PDGIS	Pemenuhan kebutuhan dokter gigi spesialis	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
57	Elektrik Perencanaan dan Penganggaran (Erenggar)	Untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan sistem terpadu berbasis online.	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
58	Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	Memaparkan atau menyajikan informasi tentang ketersediaan dan pemenuhan terhadap sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku , kondisi maupun fungsi peralatan kesehatan yang baik serta dapat mendukung pelayanan kesehatan	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
59	eFarmasi	Pencatatan Pengadaan, penerimaan (yang bersumber dari pembelian maupun hibah Dinkes Provinsi, Kemenkes RI), penyimpanan, Distribusi dan pengembalian (ke Puskesmas, RS, Faskes/Institusi Lain seperti klinik, Dinas lain) dan Pelaporan Obat, BMHP, Vaksin dan sediaan Farmasi Lainnya	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
60	SELENA (Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian)	Aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ketersediaan Vaksin dan obat di Puskesmas masih tersedia	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
61	E-MONEV Obat (Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat)	Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Apotek, FKTP dan FKRTL), PBF, Industri Farmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia.	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
62	SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional)	Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh Unit Pelayanan (Apotek, Klinik & Rumah Sakit), Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

63	SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Secara Elektronik)	Aplikasi dalam mendukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk manajemen rantai pasokan dan rantai dingin secara realtime. Pengembangan dan operasional aplikasi didukung oleh UNDP Indonesia.	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
64	ELogistik Obat	Memfasilitasi pengelolaan data obat dan BMHP untuk menghasilkan informasi dalam mendukung pemantauan ketersediaan obat dan BMHP	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
65	Microsite Komdat Promkes	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, informasi dan laporan capaian promkes dan pemberdayaan masyarakat	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
66	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Untuk mengendalikan faktor risiko PTM melalui sistem informasi terpadu	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
67	SIPELULIE DILA	Aplikasi yang berbasis Web tentang Sistem Pengendalian Dokumen Laboratorium Internal dan Eksternal Dalam Informasi Layanan Aplikasi	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
68	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA)	Untuk Memantau data kunjungan masalah kesehatan jiwa	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
69	CERIA	Sebagai pengingat yang efektif, membantu para remaja putri untuk mematuhi jadwal konsumsi tablet tambah	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
70	Kescatin	Sebagai media informasi dan edukasi bagi calon pengantin dan pasangan usia subur	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
71	EDesk	Memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengajukan Alokasi Kegiatan maupun pembelian / penggunaan Dana DAK Kemenkes	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
72	HFIS	Untuk pembayaran jasa kapitasi tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
73	BPJS pcare	Untuk pembayaran jasa kapitasi tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Open Source	Dinas Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

74	Pengatur Pola Konsumsi Pangan Bergizi dan Seimbang (POSTING CINTA)	Mengedukasi kepada Ibu/Bidan mengenai gizi buruk dan tracking pola konsumsi dan kebutuhan gizi pada bayi	Open Source	Dinas Ketahanan Pangan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
75	Tauval SPBE	Mengetahui indeks SPBE IPPD	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
76	Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SIMPAN) SPBE	Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan kembali pengetahuan yang belum diketahui oleh semua pihak seperti notulen kegiatan penerapan SPBE, profil, dokumen IT SPBE dan agenda kegiatan	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
77	SIGMON	Memeriksa dan merekam kondisi sinyal jaringan, Memeriksa kecepatan internet seluler, untuk penelusuran web dan streaming video Tes Multi untuk Tes Kecepatan, Tes Web, dan Tes Video berturut-turut, Route Test untuk pengukuran kualitas sinyal pada rute dan melihat hasilnya dalam bentuk peta. Semua hasil tes langsung diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lokasi dengan kualitas yang kurang memadai akan ditindaklanjuti. Data yang dikumpulkan oleh SIGMON digunakan Tim Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika DJPPI untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan optimasi jaringan guna meningkatkan kualitas layanan internet, sehingga Quality of Experience (QoE) di sisi Masyarakat lebih baik dan lebih cepat	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
78	Portal Kabupaten Muara Enim	digunakan sebagai media diseminasi informasi kabupaten muara enim seperti kegiatan pemerintahan dan data pendukung lainnya	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
79	Muara Enim Center (MANCE)	Memberikan berbagai informasi bagi masyarakat	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

80	Radio Suara Muara Enim	Memberikan berbagai informasi bagi masyarakat	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
81	Muara Enim CSIRT	Sebagai media pengaduan insiden Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
82	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR)	Digunakan oleh masyarakat umum yang berfungsi untuk menerima aspirasi dan pengaduan publik	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
83	Sistem Informasi Statistik Sektor Terpadu Berbasis TI (SISTER BETI)	Memberikan berbagai informasi statistik sektoral dari tiap OPD	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
84	Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Layanan Yang Memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan Informasi dan Layanan informasi yang dapat langsung diakses tanpa memerlukan verifikasi.	Open Source	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
85	Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan UMKM (SIMKOPUKM)	Menampilkan data Direktori Koperasi, Grafik penilaian koperasi, Peta sebaran koperasi, Data UMKM, Data keragaan UMKM	Open Source	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
86	Online Data System (ODS)	Memberi kemudahan dalam melacak simpanan dan pinjaman, mendapatkan laporan keuangan, serta memperoleh informasi tentang kegiatan koperasi dengan lebih cepat dan efisien.	Open Source	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
87	Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif.	Open Source	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
88	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	sebagai Indeks kualitas lingkungan hidup yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.	Open Source	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
89	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	Mengetahui capaian kinerja pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah	Open Source	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

90	Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman dan Gempita (GIWANG SUMSEL)	Giwang Sumsel sebagai tempat promosi segala potensi pariwisata di Sumatera Selatan	Open Source	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
91	REDKAR	dengan adanya keanggotaan Relawan Kebakaran, sebagai warga Desa setempat dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan efisien demi mencegah terjadinya kebakaran dan apabila terjadi kebakaran demi mempercepat Respon time kelokasi kejadian dan laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai relawan membantu pemadaman secara dini (kebakaran awal) yang dapat dipadamkan sebelum tim khusus dari Dinas Kebakaran	Open Source	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
92	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGADP3A)	Aplikasi ini dapat dipergunakan untuk menyimpan data Gender dan Anak sesuai dengan indikator yang ada pada setiap Perangkat Daerah.	Open Source	Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
93	Sistem Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa (SIMPAPDES)	penjaringan bakal calon aparatur pemerintah desa	Open Source	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
94	WEB GIS (Website Berbasis Peta / Keruangan) Peluang Investasi	Website ini menyajikan informasi gambaran umum penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim.	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
95	Bedah Investasi Muara Enim	Menyajikan Informasi Peluang & Potensi Investasi, Profil Kabupaten, Realisasi Investasi, Produk Hukum, UMKMK dan informasi lainnya terkait Investasi di Kabupaten Muara Enim	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
96	Sistem Informasi Cepat, Efisien, Responsif dan Berinteraksi (SICERDAS)	Memberikan informasi terkait pelaksanaan perizinan	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
97	MAMPIR BOS (Muara Enim Peluang Investasi Regional melalui Bedah Investasi Online Sistem)	Menampilkan potensi-potensi yang ada di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Muara Enim, baik sektor pertanian dan perkebunan yang disajikan dengan visual GIS yang menarik	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

98	Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud)	Mempermudah kepada pemohon untuk mendaftar/memperpanjang izin yang berkaitan dengan tenaga kesehatan	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
99	OSS (Online Single Submission)	Mempercepat atau mempermudah pengurusan perizinan berusaha	Open Source	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
100	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Online)	Digunakan sebagai media pendaftaran peserta didik baru	Open Source	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
101	SIMANIS(PPDB Online)	Input data Peserta didik baru Pada Satuan Pendidikan, Berdasar Zonasi, Afirmasi, Domisili dan Prestasi	Open Source	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
102	Elsimil (Sistem Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)	selain sebagai alat skrining, Elsimil juga berfungsi sebagai media komunikasi dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan	Open Source	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
103	New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN	Pendataan Keluarga (PK), Pengendalian Lapangan (Dallap), dan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) atau Pelayanan KB (YAN KB)	Open Source	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
104	Kampung KB	Untuk memudahkan para petugas di lapangan dalam proses pelaporan Kampung KB	Open Source	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
105	SIPERINDU (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)	Untuk mendapatkan informasi terkait peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk	Open Source	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
106	Sistem Pemantauan Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP)	Untuk memberikan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Open Source	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

107	Ngekir Online	untuk mempermudah dalam pendaftaran untuk pengujian kendaraan bermotor	Open Source	Dinas Perhubungan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
108	Satudata-KKP	sebagai media informasi untuk mengetahui data statistik perikanan (produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi produk olahan ikan) setiap semesternya	Open Source	Dinas Perikanan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
109	Sistem Pelaporan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan Daerah	Mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari UML kepada Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan	Open Source	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
110	Sistem Informasi Industri Nasional	Mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah serta memudahkan bagi pengguna informasi baik pelaku industri, pemerintah dan instansi terkait untuk mengakses data terkait IKM yang ada pada daerah masing-masing ataupun di taraf nasional.	Open Source	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
111	E-Learning Center (KUDAGANG)	Fungsi LMS Kudaganga selain untuk memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran adalah untuk siswa dapat dengan mudah mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Beberapa LMS sudah dilengkapi dengan fitur kuis dan ujian online agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya.	Open Source	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
112	Muara Enim Digital Library (MEDALI)	Menyediakan Layanan Perpustakaan Secara Eletronik	Open Source	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
113	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip sampai dengan penyusutan arsipnya	Open Source	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
114	SIKN JIKN	memberikan informasi kearsipan statis	Open Source	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
115	Simon Balek Dalu Yan Kesal (Sistem Informasi Online Berbasis Aplikasi Data Pemerlu	mempermudah melakukan pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Open Source	Dinas Sosial	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

	pelayanan Kesejahteraan Sosial)				
116	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	melakukan pendataan penerima bantuan pemerintah	Open Source	Dinas Sosial	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
117	Panti Rakyat	Untuk melakukan pendataan masyarakat yang menerima program perlindungan sosial dalam bentuk santunan kematian	Open Source	Dinas Sosial	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
118	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Terintegrasi	Portal Pengusulan /e-Proposal Kegiatan APBN Pusat dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI	Open Source	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
119	Aplikasi Penginputan Luas lahan, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan (SITAMPAN)	Aplikasi yang dibangun oleh direktorat jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sebagai upaya untuk pendataan data tanaman pangan dan data bantuan pemerintah yang memuat informasi langsung dari lapangan yang berkaitan dengan Luas lahan, Luas Panen, Produksi, laporan kerusakan/gagal panen, alih fungsi lahan dan sebagainya	Open Source	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
120	SIAP KERJA	Untuk memberikan layanan kepada pencari kerja; Untuk memberikan layanan kepada pemberi kerja; Untuk memberikan layanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Open Source	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
121	Penilaian Kapabilitas APIP	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP terhadap 6 Elemen yaitu, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan di Inspektorat Kabupaten Muara Enim	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

122	Jaga	Monitoring Capaian Kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kab. Muara Enim melalui 8 area intervensi yaitu Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, Pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Desa	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
123	SPIP Terintegrasi	Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi penilaian Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
124	SIPP ASN	Pengawasan Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) yang terdiri atas pengawasan tahap Perencanaan, Pengumuman Lowongan dan Lamaran, Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Wawancara dan Kompetensi Tambahan, Pengumuman Hasil Seleksi dan Pengangkatan CPNS & PPPK	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
125	Sibijak	SIBIJAK merupakan sistem terpadu dengan integrasi layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP (Pusbin JFA) dan dimanfaatkan oleh pimpinan APIP dan auditor pada K/L/Pemda. Tools dalam Aplikasi SIBIJAK berisi Data Auditor, Pengusulan Formasi, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA, Pendaftaran Diklat, Sertifikasi JFA, dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer.	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
126	Sismonev	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
127	Whistleblower System (WBS)	Membuat dan menyampaikan aspirasi dan pengaduan	Open Source	Inspektorat	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

128	Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Menyediaan informasi produk hukum meliputi Produk Hukum Nasional (Undang-undang Dasar, Undang- undang, PERPU, TAP MPR RI, PP, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri) dan Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup). Untuk Produk Hukum Daerah sudah terintegrasi dengan JDIHN (Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum Nasional)	Open Source	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
129	SPSE	Melakukan pelelangan dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Open Source	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
130	ANJAB-ABK Kabupaten Muara Enim	Menyusun Analisis Jabatan dan Menyusun Analisis Beban Kerja	Open Source	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
131	e-SAKIP Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Melakukan penguploadan Dokumen Kinerja pada aplikasi e-SAKIP	Open Source	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
132	SIMONA (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) Kementerian Dalam Negeri	Pengajuan administrasi Pengajuan TPP ke Kementerian Dalam Negeri	Open Source	Sekretariat Daerah	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
133	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH SETWAN)	Mempublikasi raperda dan perda	Open Source	Sekretariat Dewan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
134	SP2KP	Aplikasi SP2KP berfungsi sebagai Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok sebagai bukti akan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan arus perdagangan komoditas strategis di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan yang akan mempertajam dan memperjelas indikasi-indikasi sistem perdagangan dan arus lalu-lintas komoditas, selain itu dengan tersedianya data harga yang lengkap, kontinu dan mutakhir	Open Source		Pemerintah Kabupaten Muara Enim
135	Aplikasi PSR Online	Portal pengusulan berkas administrasi Program Peremajaan Sawit Rakyat bagi Lembaga Pekebun, portal verifikasi usulan oleh Dinas Perkebunan TK. Kabupaten, TK. Provinsi, Ditjen Perkebunan dan BPKDPKS	Open Source	Dinas Perkebunan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

136	Aplikasi Saprass Online	Portal pengusulan berkas administrasi Program Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Lembaga Pekebun, portal verifikasi usulan oleh Dinas Perkebunan TK. Kabupaten, TK. Provinsi, Ditjen Perkebunan dan BPKDPKS	Open Source	Dinas Perkebunan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
137	Aplikasi e-talent	Aplikasi penilaian kelayakan pegawai menduduki struktural	Open Source	BKPSDM	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
138	Dbpdikbud (Data base pegawai dikbud)	Aplikasi data base kepegawaian untuk guru ASN	Open Source	Diknas	Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Sumber : Laporan Tahunan Bidang E-Government tahun 2024

Dalam peningkatan pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengembangan website desa. Untuk menjalankan website desa telah ada program satu desa satu tenaga IT (Informasi Teknologi) pada tahun 2024 telah dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para Tenaga IT agar bisa mengoperasikan website desa dengan baik sebanyak 510 peserta dari desa dan kelurahan, kemudian para tenaga IT diberi template website serta didukung dengan hosting (tempat untuk menyimpan semua file dan data, sehingga bisa diakses oleh semua orang melalui internet).

4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menginisiasi Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (Smart City) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden untuk menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Pada periode tahun 2017 s.d. 2019, sebanyak 100 (seratus) kota dan kabupaten menerima pendampingan dari para ahli dalam pembuatan masterplan dan penerapan konsep Kota Cerdas (*Smart City*). Program ini kemudian berkembang

menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City). Pada tahun 2021, program ini berfokus pada 48 (empat puluh delapan) kota dan kabupaten yang berada dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN). Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 50 (lima puluh) kota dan kabupaten lainnya menerima pendampingan penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City). Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun.

Selanjutnya, guna mengawal jalannya pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan juga mengidentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City), maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun pemerintah kota dan kabupaten. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kota atau kabupaten

Dalam mendukung program Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem kabupaten Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengikuti kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi smart city dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (smart city) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (quick win) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (smart city). Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (smart city) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan

dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota. Dalam mendukung program Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem kabupaten Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan kegiatan Penilaian Kota Cerdas dan sewa wifi di 33 titik lokasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muara Enim menjadi Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Smart Regency adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten mewujudkan Regency atau Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten yang bisa melayani, memudahkan pelayanan, mendekatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sedang menjadi kebutuhan masyarakat untuk informasi. Tujuannya adalah bagaimana bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Gerakan Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten Muara Enim dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim

Konsep Smart Regency juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari karena konsep penganturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Tujuan kota pintar juga bagaimana dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi di kota ini, kemudian menarik penghuni baru, bagaimana penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, dan usahawan bertempat tinggal di kota kita. Kesemuanya itu tolak ukurnya adalah kota tersebut memiliki daya tarik yang kuat.

Sebuah Kabupaten dapat dikatakan Smart Regency jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki system transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan

bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energy terbarukan.

Elemen-elemen dari pada smart regency adalah :

1. *Smart envirotnment*: Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya;
2. *Smart economy*: Memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (*cashless*) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya;
3. *Smart branding*: Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata;
4. *Smart government*: Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik;
5. *Smart society*: Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; dan
6. *Smart living*: Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah

Langkah-langkah yang akan dilakukan kabupaten muara enim untuk mencapai keberhasilan penerapan program smart regency yaitu :

1. Membentuk dewan smart city dan memastikan bahwa dewan *smart city* memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kabupaten melalui upaya-upaya inovatif;
2. Menggalang kerja sama dengan semua pihak
3. Mengembangkan kebijakan pro inovatif dan kolaboratif.

Dengan Smart City maka semua organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem informasi bisa terintegrasi dalam satu sistem, sehingga siapa pun, kapan pun di mana pun bisa mendapatkan informasi, dikaitkan dengan informasi publik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini.

Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan meningkatnya nilai indeks SPBE sangat didukung dengan Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
- Pusat data (data center) terintegrasi
- Pembangunan jaringan FO untuk keamanan data
- Muara Enim Command Center atau MECC

Untuk mendukung smart city telah dipasang akses wifi publik di lingkup Kabupaten Muara Enim tahun 2024 diantaranya :

- Pasar Muara Enim
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemda Dalam Gedung
- Seputaran Jembatan Enim Dua
- Tugu Kopi
- RSUD HM Rabain
- Seputaran Tugu Monpera
- Taman Adipura 1
- Taman Adipura 2
- Kolam Renang
- Gor Sekundang Bara 1
- Gor Pancasila 2
- Gor Pancasila 1
- Gor Sepak Takraw
- Kantor DPRD 1
- Kantor DPRD 2
- Taman Serasan Sekundang
- Tugu Pahlawan ME
- Gedung Arsip Dinas Perpustakaan
- Rumah Baca Kelurahan Muara Enim
- Gerai Oleh-oleh

- Taman Adipura 3
- Tugu Menpora Tanjung Enim

5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

Dalam rangka upaya pengembangan dan memperluas cakupan pembangunan infrastruktur digital yang dapat dinikmati secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Muara Enim. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam meningkatkan tingkat teledensitas sangatlah penting.

Presiden dengan jelas memberikan arahan bahwa harus membajak momentum pandemic COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Mempersiapkan roadmap transformasi digital disektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO-nya dan sampai dengan tahun 2024 ini masih sewa.

Untuk meningkatkan infrastruktur dan dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah untuk kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Adapun peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah yang dimaksud adalah pemeliharaan CCTV, pemeliharaan jaringan *Fiber Optic*,

peralatan media command center, peralatan videotron indoor dan outdoor, peralatan jaringan *Fiber Optic*, router utama dan router kecamatan.

Pemeliharaan CCTV

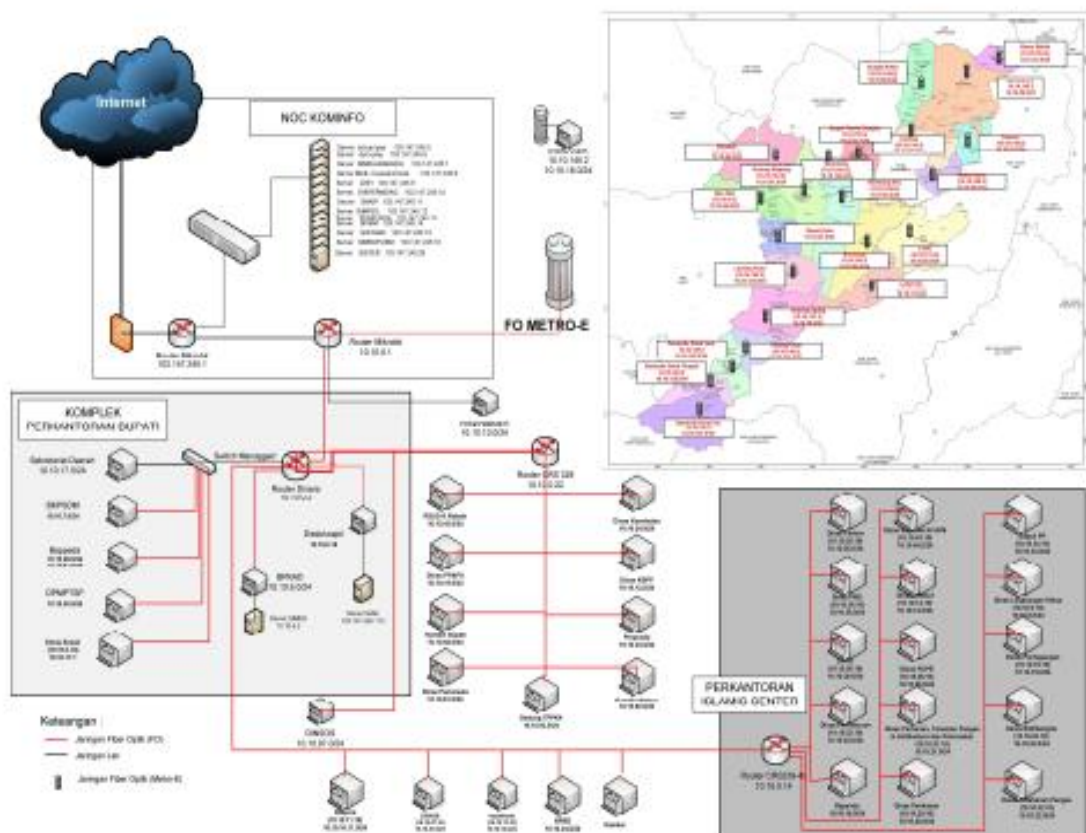
Pemeliharaan CCTV yang dilakukan pemeliharaan di 6 lokasi berbeda yaitu:

1. Bundaran air mancur
2. Jembatan Enim II
3. Tugu Selamat Datang Muara Enim
4. Simpang Islamic Center
5. Tugu Kopi
6. Kecamatan Tanjung Agung

Pemeliharaan Jaringan *Fiber Optic*

Pemeliharaan jaringan Fiber Optic berlokasi disepanjang jaringan intra perkantoran Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Network Maps



6. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik

Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik adalah pelaksanaan kegiatan perlindungan informasi pada aset/ fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim melalui kontra penginderaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih saat ini, mempermudah masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, begitu juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan perangkat berbasis TIK sangat membantu di dalam memudahkan koordinasi antara pejabat pemerintah di pusat dan di daerah walaupun terpisah antara ruang dan waktu.

Namun demikian, dibalik kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan dengan adanya teknologi TIK tersebut, terdapat resiko adanya ancaman terhadap informasi yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti kebocoran informasi, pengubahan informasi, modifikasi informasi, informasi hoaks, dan lain sebagainya.

Ancaman terhadap informasi dapat juga disebabkan oleh pemilik informasi itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pengamanan informasi, ketidaktahuan cara mengamankan informasi, melakukan share informasi rahasia/terbatas (informasi yang dikecualikan) di media yang tidak aman dan ketidakpedulian individu terhadap dampak negatif dan kebocoran informasi. Hal tersebut menyebabkan orang lain yang tidak bertanggung jawab, dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan informasi itu tanpa ijin dari pemilik informasi.

Pada instansi perintah, salah satu fungsi informasi adalah sebagai bahan untuk membuat keputusan di dalam penyelenggaraan pemerintah. Semakin penting suatu informasi, maka informasi tersebut semakin bernilai dan perlu untuk dilindungi dan diamankan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Instansi pemerintah menjadi salah satu target dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi dengan cara yang ilegal, dengan berbagai modifikasi kepentingan. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara ilegal adalah dengan cara penyadapan. Penyadapan dapat

terjadi pada saat informasi ditransmisikan melalui saran komunikasi yang tidak aman. Dapat juga terjadi pada saat informasi belum ditransmisikan (informasi bocor pada saat dibuat).

Seiring dengan mudahnya mendapatkan peralatan penyadapan berbasis teknologi Radio Frequency (RF) atau Internet Protocol (IP), yang diperjualbelikan secara bebas baik secara online maupun offline, maka potensi ancaman kebocoran informasi di instansi pemerintah menjadi semakin besar.

Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Cellular Interception

Adalah penyadapan jaringan melalui telekomunikasi seluler

2. RF Interception

Penyadapan melalui frekuensi radio

3. Network Interception

Penyadapan melalui jaringan internet

Untuk mengatasi ancaman terhadap penyadapan Informasi tersebut, maka perlu upaya untuk mengamankan Informasi, sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Informasi menjadi terjaga, Salah satu cara mencegah terjadinya penyadapan Informasi adalah melalui kegiatan Kontra Penginderaan atau *counter surveillance*. Kegiatan ini dilakukan dengan mengecek terhadap barang-barang yang berada di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan penyadapan / *surveillance* seperti hidden camera, button camera, security camera, spy camera, stealth wireless headset, wireless pinhole camera, wireless tapping dan perangkat sadap lainnya, melakukan analisis dan melokalisir alat sadap, sehingga ruangan menjadi steril dari alat penyadap. Dengan dilaksanakannya kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik/kontra penginderaan agar aset / fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menjadi terlindungi dari upaya pencurian informasi yang menggunakan alat penyadap Radio Frequency (RF) yang mungkin dipasang permanen oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara ilegal.

Pada tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan lokasi/tempat sebagai berikut :

- Ruang kerja Bupati Muara Enim
- Ruang rapat Bupati Muara Enim
- Ruang kerja Sekda kab. Muara Enim
- Rumah jabatan Bupati Muara Enim
- Ruang kerja Asisten III
- Kantor Kepala Dinas DPMTSP
- Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 3 DPRD Kab. Muara Enim

7. Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan (e-government) di Pemkab Muara Enim penerapannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya kita dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tentunya penerapannya harus menggunakan sistem informasi yang handal dengan memperhatikan aspek keamanan informasi meliputi kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan nir penyangkalan Mengingat adanya Informasi terbatas / strategis / dikecualikan yang perlu dikomunikasikan.

Sistem informasi yang digunakan perlu ditunjang oleh sistem Persandian yang memadai seperti Jaring Komunikasi Sandi (JKS) pada e-mail Sanapati. Pentingnya Jaring Komunikasi Sandi dalam tata kelola pemerintahan, salah satu fungsinya adalah mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebocoran data yang dapat mengganggu roda kegiatan pemerintahan khususnya di Kabupaten Muara Enim.

E-mail Sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks dengan tingkat keamanan yang tinggi serta memiliki beberapa kelebihan.

Kelebihan dari E-mail Sanapati ini dapat memproteksi terhadap fake email, spam email, phising link, dan email bombing. Email ini juga sudah diuji dan terbukti berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, BUMN, TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota).

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui E-mail Sanapati ditujukan untuk Perangkat Daerah, dengan tujuan

- Agar OPD dapat memanfaatkan dan menerapkan secara optimal penggunaan *e-mail* Sanapati ini, dikarenakan pendistribusian surat masuk baik dari Instansi pusat maupun dari provinsi akan di distribusikan melalui e-mail Sanapati ini dan tidak lagi door to door yang mana kurang efektif dan tidak efisien.
- Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui E-mail Sanapati ini adalah agar dalam proses pendistribusian surat baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, maupun dari pemerintah daerah itu sendiri dapat berjalan secara cepat, efektif, dan efisien serta dapat menerapkan konsep (paperless) atau meminimalkan penggunaan kertas dan tentu saja tidak melupakan dari sisi keamanan informasi dan data, dimana e-mail Sanapati ini dikelola langsung oleh BSSN RI, sehingga meminimalkan resiko terhadap pencurian data dan informasi penting.

Selain sosialisasi jaring komunikasi sandi, tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi keamanan informasi mengingat pengamanan Informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang terintegrasi melalui jaringan dan komunikasi data menyebabkan banyak data dan informasi terdistribusi, kondisi inilah yang menjadi rentan terhadap akses bagi pihak yang tidak memiliki otoritas, insiden Keamanan Informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap sistem elektronik namun tidak terbatas pada virus, malware, maupun deface terhadap sebuah situs.

Di era digitalisasi saat ini, Keamanan Informasi menjadi hal yang sangat krusial, dengan semakin banyaknya data dan Informasi yang kita kelola, resiko kebocoran data dan serangan siber pun semakin meningkat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Keamanan Informasi adalah suatu

keharusan bagi kita semua, karena Informasi merupakan suatu asset yang memiliki nilai vital bagi suatu organisasi, maka dari itu kita harus waspada terhadap kerawanan pencurian informasi.

Sehingga pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Informasi ini dianggap penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran SDM akan pentingnya pengamanan dan Keamanan Informasi, khususnya dalam memahami dan mengenali perkembangan ancaman Teknologi Informasi terkini serta cara meminimalisir dan mencegah terhadap pencurian data dan Informasi, sehingga dapat membantu meminimalisir resiko terjadinya pencurian data dan insiden siber lainnya. Sehingga tercapainya aspek Keamanan Sistem Informasi, diantaranya kerahasiaan, keutuhan / integritas dan ketersediaan Informasi.

Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang di atur dalam perundang-undangan kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait.
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta-merta
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta-merta meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi, Surat Keputusan, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja, perjanjian

dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai, laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK). PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID. Atasan PPID merupakan penentu pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak. Dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan}}{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi Informasi Publik yang Tersedia dan Diumumkan Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Kriteria / kode
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	90%	100 %	100 %	90%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	Sangat Baik

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP sebagai berikut :

1. Monitoring Opini Aspirasi Publik

Pembangunan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat (SPIPM) adalah sistem yang bertujuan untuk menampung keluhan / pengaduan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintahan dan mengenai pembangunan daerah dalam Kabupaten Muara Enim. Saat ini sudah ada aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena termasuk aplikasi Layanan Umum yaitu aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N), melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan laporan, keluhan ataupun pengaduan yang bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat dengan satu pintu melalui LAPOR SP4N sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka. SP4N LAPOR! harus dilaksanakan secara kontinue, bertahap, dan bersifat multi sektoral. Oleh karena itu di tahun 2024 ini telah dilaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis SP4N LAPOR

Bimbingan teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan SP4N-LAPOR! kabupaten Muara Enim yang merupakan bentuk upaya yang dilakukan agar pemerintah kabupaten Muara Enim dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Adapun peserta Kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan SP4N LAPOR Kabupaten Muara Enim tahun 2024 adalah 120 orang pejabat penghubung SP4N LAPOR Perangkat Daerah lingkup Pemkab Muara Enim, BUMD dan Instansi vertikal dengan materi

- Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Sumatera Selatan
- Kebijakan Pengelolaan pengaduan Berkadar Pengawasan di Lingkungan Pemda

2. Kegiatan Sosialisasi SP4N LAPOR

penyelenggaraan Sosialisasi SP4N-LAPOR! merupakan bentuk upaya yang dilakukan agar pemerintah kabupaten Muara Enim dapat mengelola pengaduan

dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, yang dilaksanakan dengan 100 orang peserta dari desa Muara Gula Kecamatan Ujan Mas.

3. Kegiatan Monitoring Media

Media Monitoring merupakan kegiatan melakukan proses pencarian dan analisis informasi yang tersedia di media cetak atau digital dengan memanfaatkan kata kunci tertentu untuk topik yang ingin diteliti. Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses informasi melalui internet saat ini membuat pencarian artikel tidak hanya dilakukan secara manual, sekarang ada banyak alat pemantauan media sosial dan layanan pemantauan media yang tersedia. Tentunya hal ini dapat membantu untuk tetap *up-to-date* dengan tren terbaru. Lantas mengapa media monitoring begitu penting? Kini bukan hanya publik figur seperti artis dan musisi saja yang mampu memberikan pengaruh, tetapi juga pejabat publik dan akun-akun resmi pemerintah yang cukup banyak memberikan pengaruh terhadap audiens di dunia maya. Hal ini berpengaruh terhadap cakupan manfaat media monitoring, sehingga media monitoring tidak hanya sebatas mampu menganalisa dan mengumpulkan data-data yang terjadi di media online tetapi juga tren terkini di media sosial. Tanpa menggunakan alat bernama media monitoring tentu saja Anda akan kesulitan untuk mengumpulkan data, mencari tokoh yang berpengaruh dalam percakapan yang terjadi, siapa yang pertama kali memulai atau melempar isu serta menganalisa respon yang ada. Selain sebagai alat untuk menganalisa dan mengumpulkan data-data di media online, media monitoring juga berperan sebagai acuan berbagai sektor untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. Media Monitoring dapat mengetahui suatu isu secara mendalam, dengan *keyword* ataupun topik yang menjadi salah satu data yang dikumpulkan, lalu kemudian diolah dan dianalisa sehingga dapat memberikan *insight* kepada instansi pemerintahan. *Insight* inilah yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi *decision maker*.

Penggunaan Media monitoring difungsikan sebagai sarana dalam mendeteksi perkembangan isu baik positif maupun negatif tentang Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Isu-isu prioritas tentunya perlu mendapatkan penanganan yang lebih cepat agar suatu isu tidak mencapai situasi krisis dan membahayakan citra pemerintah. Dengan deteksi isu secara lebih dini maka suatu isu ditindaklanjuti secara lebih cepat.

Adapun output dari kegiatan monitoring media ini adalah terpantaunya isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang dikumpulkan dalam bentuk laporan mingguan sebagai bahan pengambilan suatu langkah atau kebijakan untuk menindaklanjuti berkembangnya isu yang beredar.

2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik berisikan kegiatan tentang kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui beberapa media antara lain :

a. Media Massa

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media massa seperti :

- Majalah

Penyebarluasan informasi melalui majalah yaitu majalah yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sendiri yaitu majalah L@ras. Majalah L@ras merupakan majalah yang memberikan informasi tentang Hasil pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dan informasi mengenai pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim, ditampilkan juga ulasan mengenai berbagai aktifitas Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada tahun 2024 ini di cetak sebanyak 600 buku untuk dipublikasikan.

b. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)

- Website PPID : ppid.muaraenimkab.go.id

c. Media Luar Ruang

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media luar ruang seperti :

- Spanduk

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui spanduk, pada tahun 2024 ini di cetak sebanyak 152 buah untuk dipublikasikan.

- Baliho

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui baliho, pada tahun 2024 ini di cetak sebanyak 869 buah untuk dipublikasikan.

- Leaflet

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui Leaflet, pada tahun 2024 ini di cetak sebanyak 232 buah untuk dipublikasikan.

3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Untuk memenuhi hak publik (masyarakat) dalam memperoleh informasi yang sehat, berimbang, edukatif, mencerdaskan dan mencerahkan maka didirikan Radio Suara Muara Enim dengan maksud penyelenggaraan penyiaran Radio Suara Muara Enim dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip independent, netral, menginspirasi, berpihak kepada kebenaran dan menjunjung tinggi pilar-pilar kebangsaan.

Radio Suara Muara Enim 97.4 FM (RAME FM) merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. LPPL Radio Suara Muara Enim berdiri pada tanggal 15 Oktober 2019. Saat ini telah resmi beroperasi baik melalui live streaming maupun frekuensi yang memancarkan secara teresterial pada kanal frekuensi 97.4 MHz sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 02545107-000SU/2020222027 tanggal 11 Maret

2022 dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) NOMOR : 1079/RF.01.02/2022
Masa Berlaku IPP 22 September 2022 s.d. 21 September 2027.

LPPL Radio Suara Muara Enim merupakan media atau sarana yang menjadi penghubung bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan masyarakat terkait dengan penyedia informasi yang sehat, berimbang, edukatif, mencerdaskan dan mencerahkan.

Radio Suara Muara Enim didirikan dengan tujuan untuk memberikan peran sebagai :

1. Media penyebarluasan informasi daerah dan pembangunan
2. Sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat
3. Sarana komunikasi publik
4. Sarana pemberdayaan masyarakat
5. Sarana pengembangan kreatifitas dan budaya
6. Sebagai media edukasi bagi anak-anak

Dengan mata acara sebagai berikut :

- Berita
- Penerangan / Informasi
- Pendidikan dan kebudayaan
- Agama
- Hiburan dan musik
- Acara Penunjang / layanan masyarakat

4. Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan pelayanan informasi publik berisikan kegiatan mengenai PPID. Sesuai dengan amanat undang-undang menyebutkan perlu ada lembaga masyarakat yang mengakses keterbukaan informasi publik maka ada lembaga yang bernama Komisi Informasi Publik (KIP) yang berada di Provinsi untuk di Kabupaten bernama Badan Publik. Di Badan Publik nama organisasinya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang keanggotaannya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPID berfungsi sebagai wadah penyedia informasi dan dokumentasi dibutuhkan masyarakat, dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih muda

dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Jadi PPID utama ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sedangkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Muara Enim adalah PPID Pembantu.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. PPID adalah pejabat yang diangkat oleh pimpinan tertinggi badan publik melalui Surat Keputusan (SK). PPID bertanggung jawab kepada atasan langsung PPID. Atasan PPID merupakan penentu pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi yang dikecualikan atau tidak. Dalam melaksanakan wewenangnya, atasan PPID berkoordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen layanan informasi publik. Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen tentang layanan informasi publik.

Pada tahun 2024 telah diadakan kegiatan Bimbingan Teknis PPID Kabupaten Muara Enim sebanyak 65 orang PPID Pelaksana Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi dan kinerja PPID serta meningkatkan pelayanan PPID dalam memberikan informasi kepada publik di Kabupaten Muara Enim.

5. Layanan Hubungan Media

Sub kegiatan layanan hubungan media mengelola kegiatan media center yaitu pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet. Media center ini terletak di berbagai daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Harapannya, di seluruh provinsi, kota/kabupaten akan memiliki satu media center

Selain itu media center juga dapat menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya, serta komunikasi dan informasi antar masyarakat. Konsep awal Media Center yang dulunya merupakan tempat mengakses informasi bagi wartawan, kini telah berubah menjadi tempat mengakses informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat, baik pelajar, pekerja, masyarakat dari berbagai profesi, termasuk wartawan. Pada tahun 2024 kegiatan ini ditarget 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi sebanyak 1 berkas dokumen informasi aktual yang diupdate melalui media center terealisasi.

6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media pelayan informasi. Keberadaan UU KIP inilah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan pembinaan terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi terdapat beraneka ragam komunitas/kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi. Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang mendukungnya dan perlu mengenal dan memetakan potensi, kelompok masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap potensi kelompok yang ada di setiap daerah. Setelah itu dikategorikan untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tersebut, misalnya : kelompok wanita, pemuda, pelajar, wirausaha dan lain-lain.

Tugas KIM

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, KIM memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi.
- Memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah.
- Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain.
- Memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Fungsi KIM

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Terdapat empat fungsi KIM, yaitu :

- Sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horisontal; dari KIM ke pemerintah secara bottom up; serta dari pemerintah kepada masyarakat secara top down.
- Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
- Sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi komunikasi, serta sebagai media watch.
- Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Peran KIM

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap berikutnya, setelah

ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut.

- Fasilitator informasi bagi masyarakat
- Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
- Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat
- Kontrol sosial dalam pembangunan
- Pelancaran arus informasi
- Terminal informas

Sasaran pembentukan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) sebanyak 256 KIM dalam Desa / Kelurahan (246 desa dan 10 Kelurahan), pembentukan KIM baru terbentuk sebanyak 10 KIM dan dibentuk tahun 2022, untuk tahun 2023 ini dilakukan pembinaan terhadap 10 kelompok KIM tersebut diantaranya :

Tabel 3.13
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KIM
1.	Ujan Mas	8 KIM
2.	Benakat	5 KIM
3.	Gunung Megang	12 KIM
4.	Belimbing	9 KIM
5.	Rambang Niru	15 KIM
6.	Empat Petulai Dangku	9 KIM
7.	Lawang Kidul	6 KIM
8	Tanjung Agung	13 KIM
9.	Panang Enim	11 KIM
10.	Muara Enim	16 KIM
11.	Rambang	12 KIM
12.	Lembak	10 KIM
13.	Gelumbang	23 KIM
14.	Kelekar	7 KIM

15.	Lubai	10 KIM
16.	Lubai Ulu	11 KIM
17.	Sungai Rotan	19 KIM
18.	Belida Darat	10 KIM

Pada tabel di atas, tahun 2024 Kelompok Informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk pada sebanyak 206 KIM, sedangkan pada tahun 2023 sudah dibentuk sebanyak 10 KIM sehingga jumlah KIM yang sudah dibentuk sampe dengan tahun 2024 sebanyak 216 KIM.

7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

Indikator dari kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan adalah jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media :

a. Media massa

- Surat kabar

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui surat kabar yang kerjasama dengan pihak media yaitu melalui surat kabar harian dan surat kabar mingguan, tahun 2024 penyebarluasan informasi melalui surat kabar harian dilaksanakan sebanyak 117 kali tayang, surat kabar mingguan dilaksanakan dengan 173 kali tayang.

- TV

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui TV yang kerjasama dengan pihak media yaitu TVRI, PalTV, TV One, untuk tahun 2024 dilaksanakan dengan 43 kali tayang.

b. Media Online

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media online yang kerjasama dengan pihak media online, untuk tahun 2024 dilaksanakan dengan 262 kali tayang.

c. Media Baru

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka diseminasi informasi publik melalui media baru seperti :

- Website pemerintah Kab.Muara Enim (<http://muaraenimkab.go.id>)
- Facebook Diskominfo Muara Enim
- Instagram Diskominfo Muara Enim
- Youtube
- Twitter
- Aplikasi Muara Enim Centre (MANCE)
- Website PPID : ppid.muaraenimkab.go.id

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:

Tabel 3.14.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/ Program Pendukung	Indikator Kinerja	Target			Anggaran			Kriteria / kode
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Dalam ribu)	Realisasi (Dalam Ribu)	% Capaian	
1		2	6	7	8				9
1	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,00	3,29	109,66%				
	Program Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100%	100%	100%	11.418.305.350	10.779.453.959	94,41%	
	Program Penyelenggaraan	Persentase terpenuhinya	90%	100%	100%	418.920.200	414.803.509	99,02%	

	Persandi an untuk Pengama nan Informasi	keamanan Informasi Pemerintah Daerah							
						11.837.225.550	11.194.257.468	94,56%	
2	Meningk atnya keterbuk aan informasi	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	100%	100%	100%				
	Program Informasi dan Komunik asi Publik	Persentase Informasi yang didisemina sikan dan dipublikasik an	90%	100%	100%	7.868.107.040	.7.826.318.594	99,47%	
	Program Penyelen ggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirka n	80%	100%	100%	428.423.800	427.205.098	99,72%	
						8.296.530.840	8.253.523.692	99,48%	

Dari tabel diatas bahwa pagu anggaran untuk mendukung indikator indeks SPBE sebesar Rp. 11.418.305.350,- terealisasi sebesar Rp. 10.779.453.959,- atau 94,41% dengan capaian kinerja 100% ada efisiensi anggaran sebesar Rp.638.851.391,-. Pagu anggaran yang mendukung indikator persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP sebesar Rp. 8.296.530.840,- dengan realisasi Rp. 8.253.523.692,- atau sebesar 99,48% dengan capaian kinerja 100% ada efisiensi anggaran sebesar Rp.43.007.148,-.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim atau yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program, 14 Kegiatan dan 45 sub kegiatan antara lain yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Sebesar **Rp.8.453.049.874,-** dengan realisasi sebesar **Rp.7.909.243.911,10,-** atau **93,57%** program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sebesar **Rp.46.976.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.44.645.400,-** atau **95,04%** kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Dengan anggaran sebesar **Rp. 20.236.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.19.944.200,-** atau sebesar **98,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.238.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.498.700,- atau sebesar 91,02%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.4.819.000,- dan realisasi keuangan sebesar

- Rp.4.563.500,-** atau sebesar **94,70%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.2.500.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.375.000,-** atau sebesar **95,00%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
 - e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.143.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.855.000,-** atau sebesar **94,40%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
 - f. Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar **Rp.6.039.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.409.000,-** atau sebesar **89,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen LPPD ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan jumlah dokumen AKIP ditargetkan sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar **Rp.4.687.025.704,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.183.083.845,-** atau **89,25%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu antara lain :

- a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 4.675.100.604,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.171.934.145,-** atau sebesar **89,24%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan

ASN ditargetkan sebanyak 34 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar **Rp.6.241.400,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.775.200,-** atau sebesar **92,53%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.683.700,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.374.500,-** atau sebesar **94,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang ditargetkan sebanyak 2 laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar **Rp.36.377.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.175.857,10,-** atau **99,45%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.36.377.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.175.857,10,-** atau **99,45%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen kendaraan dinas/operasional dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar **Rp.76.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.76.161.500,-** atau **99,56%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp.76.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.76.161.500,-** atau **99,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan yang ditargetkan sebanyak 14 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar **Rp.1.834.519.640,-** dengan realisasi **Rp.1.811.989.321,-** atau **98,77%**. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.31.530.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.31.191.000,-** atau **98,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.604.594.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.590.239.700,-** atau **97,63%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 10 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran sebesar **Rp.62.388.040,-** dengan realisasi sebesar **Rp.61.997.000,-** atau **99,37%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 3 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar **Rp.133.426.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.128.550.000,-**

atau **96,35%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.44.261.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.42.320.000,-** atau **95,61%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp.13.574.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.13.030.000,-** atau **95,99%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan anggaran sebesar **Rp.3.996.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.960.000,-** atau **99,10%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- h. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.940.749.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.940.701.621,-** atau **99,99%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 150 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.521.968.720,-** dengan realisasi **Rp.520.228.720,-** atau **99,67%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.290.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.288.800.000,-** atau **99,59%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 231.968.720,-** dengan realisasi sebesar **Rp.231.428.720,-** atau **99,77%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.262.718.160,-** dengan realisasi **Rp.258.282.580,-** atau **98,31%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp.9.517.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.9.423.500,-** atau **99,02%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan sebanyak 2 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp.132.840.960,-** dengan realisasi sebesar **Rp.128.499.080,-** atau **96,73%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang harus dibayar yang ditargetkan sebanyak 3 rekening dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp.120.360.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.120.360.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar **Rp.986.963.900,-** dengan realisasi **Rp.978.676.688,-** atau **99,16%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 299.253.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.297.874.455,-** atau **99,54%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan yang dibayar pajak yang ditargetkan sebanyak 19 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.639.300.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.632.587.233,-** atau **98,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit gedung kantor dan bandengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.24.950.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.24.815.000,-** atau **99,46%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi ditargetkan sebanyak 35 unit yaitu pemeliharaan Hardware peralatan radio, pemeliharaan software peralatan radio, pemeliharaan personal komputer/laptop, printer dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.23.460.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.23.400.000,-** atau **99,74%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah

jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi yang ditargetkan sebanyak 2 unit yaitu pemeliharaan AC dan pemeliharaan instalasi listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Alokasi anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik sebesar **Rp. 7.868.107.040,-** dengan realisasi **Rp.7.826.318.594,-** atau **99,47%**. program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotam

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 7.868.107.040,-** dengan realisasi **Rp.7.826.318.594,-** atau **99,47%**. Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan berikut :

- a. Sub kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.244.635.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.243.968.850,-** atau **99,73%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.843.801.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp.834.950.202,-** atau **98,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen yaitu melalui baliho, spanduk, leaflet, billboard, majalah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.405.717.740,-** dengan realisasi sebesar **Rp.395.043.603,-** atau **97,37%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi

publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- d. Sub kegiatan pelayanan informasi publik dengan anggaran sebesar **Rp. 147.676.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.146.936.863,-** atau **99,50%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan layanan hubungan media dengan anggaran sebesar **Rp. 54.228.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.53.038.213,-** atau **97,80%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah layanan hubungan media yang ditargetkan sebanyak 1 layanan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan anggaran sebesar **Rp.177.322.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.172.633.946,-** atau **97,36%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya yang ditargetkan sebanyak 450 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi dengan anggaran sebesar **Rp.5.994.724.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.5.979.746.917,-** atau **99,75%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan yang ditargetkan sebanyak 7 dokumen adventorial yaitu majalah, media online, media TV, media tv gretings, surat kabar harian/mingguan, media buku, media kanal (online) yaitu dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Alokasi anggaran untuk program aplikasi informatika sebesar **Rp.11.418.305.350,-** dengan realisasi **Rp.10.779.453.959,-** atau **94,41%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.9.500.908.400,-** terealisasi sebesar **Rp. 8.885.313.900,- atau 93,52%**. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan anggaran sebesar **Rp.9.500.908.400,-** terealisasi sebesar **Rp. Rp. 8.885.313.900,- atau 93,52%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah yang ditargetkan sebanyak 5 unit yaitu bandwich Internet, metro ethernet, Internet Via Vsat, Collocation, firewall dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.1.917.396.950,-** terealisasi sebesar **Rp.1.894.140.059,- atau 98,79%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 551.866.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.551.292.362,- atau 99,90%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
 - b. Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.372.361.850,-** dengan realisasi sebesar **Rp.361.452.170,- atau 97,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah aplikasi dan proses

bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan yang ditargetkan sebanyak 2 aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- c. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan anggaran sebesar **Rp.438.399.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.431.126.900,-** atau **98,34%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai masterplan smart city yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan anggaran sebesar **Rp. 554.769.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.550.268.627,-** atau **99,19%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar **Rp.428.423.800,-** terealisasi **Rp. 427.205.098,-** atau **99,72%**. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota sebesar **Rp.428.423.800,-** terealisasi **Rp. 427.205.098,-** atau **99,72%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dengan anggaran sebesar **Rp.316,396,400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.316.178.152,-** atau **99,93%**. Adapun output/keluaran dari sub

kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi dengan anggaran sebesar **Rp. 112.027.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.111.026.946,-** atau **99,11%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi yang ditargetkan sebanyak 200 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar **Rp. 418.920.200,-** terealisasi **Rp.414.803.509,-** atau **99,02%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.298.397.900,-** terealisasi **Rp. 294.769.763,-** atau **98,78%**.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan anggaran sebesar **Rp.174.385.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.173.921.000,-** atau **99,73%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik yang ditargetkan 4 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar

Rp.124.012.600,- dengan realisasi sebesar **Rp.120.848.763,-** atau **97,45%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditargetkan sebanyak 57 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota sebesar **Rp.120.522.300,-** terealisasi **Rp.120.033.746,-** atau **99,59%**.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar **Rp.120.522.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 120.033.746,-** atau **99,59%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi yang ditargetkan sebanyak 57 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya mengemban 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 28.586.806.264,-** terealisasi sebesar **Rp. 27.357.025.071,10,-** atau **95,70%** dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2024 dialokasikan sebesar **Rp.27.268.243.144,-** terealisasi sebesar **Rp.26.055.666.151,10,-** atau **95,55%** yang diarahkan untuk membiayai belanja :

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS, pembulatan gaji, tambahan penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya serta Tunjangan Kinerja

PNS/CPNS dialokasikan sebesar **Rp.4.675.100.604,-** terealisasi sebesar **Rp.4.171.934.145,-** atau **89,24 %**.

2. Belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar **Rp.22.593.142.540,-** terealisasi sebesar **Rp.21.883.732.006,10,-** atau **96,86%**.

b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.1.318.563.120,-** terealisasi **Rp. 1.301.358.920,-** atau **98,70 %**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar **Rp. 1.318.563.120,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.301.358.920,-** atau **98,70%**.

Tabel 3.15.
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Capaian Kinerja (%)
			(Rp)	Keu %	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.586.806.264,00	27.357.025.071,10	95,70	100,00
	Belanja Daerah	28.586.806.264,00	27.357.025.071,10	95,70	100,00
1.	Belanja Operasi :	27.268.243.144,00	26.055.666.151,10	95,55	100,00
	- Belanja Pegawai	4.675.100.604,00	4.171.934.145,00	89,24	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa	22.593.142.540,00	21.883.732.006,00	96,86	100,00
2.	Belanja Modal :	1.318.563.120,00	1.301.358.920,00	98,70	100,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.318.563.120,00	1.301.358.920,00	98,70	100,00
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.453.049.874,00	7.909.243.911,10	93,57	100,00
	1 Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.976.500,00	44.645.400,00	95,04	100,00
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.236.000,00	19.944.200,00	98,56	100,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.238.700,00	7.498.700,00	91,02	100,00

	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.819.000,00	4.563.500,00	94,70	100,00
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.375.000,00	95,00	100,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.143.000,00	4.855.000,00	94,40	100,00
	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kantor	6.039.800,00	5.409.000,00	89,56	100,00
	Kegiatan Administrasi 2 Keuangan Perangkat Daerah		4.687.025.704,00	4.183.083.845,00	89,25	100,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.675.100.604,00	4.171.934.145,00	89,24	100,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.241.400,00	5.775.200,00	92,53	100,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.683.700,00	5.374.500,00	94,56	100,00
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36.377.250,00	36.175.857,10	99,45	100,00
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.377.250,00	36.175.857,10	99,45	100,00
	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		76.500.000,00	76.161.500,00	99,56	100,00
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.500.000,00	76.161.500,00	99,56	100,00
	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.834.519.640,00	1.811.989.321,00	98,77	100,00
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	31.530.000,00	31.191.000,00	98,92	100,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	604.594.400,00	590.239.700,00	97,63	100,00
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62.388.040,00	61.997.000,00	99,37	100,00
	4	Penyediaan bahan logistik kantor	133.426.000,00	128.550.000,00	96,35	100,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.261.500,00	42.320.000,00	95,61	100,00
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.574.000,00	13.030.000,00	95,99	100,00

	7	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.996.000,00	3.960.000,00	99,10	100,00
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.749.700,00	940.701.621,00	99,99	100,00
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	521.968.720,00	520.228.720,00	99,67	100,00
	1	Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	290.000.000,00	288.800.000,00	99,59	100,00
	2	Pengadaan Mebel	231.968.720,00	231.428.720,00	99,77	100,00
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.718.160,00	258.282.580,00	98,31	100,00
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.517.200,00	9.423.500,00	99,02	100,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.840.960,00	128.499.080,00	96,73	100,00
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.360.000,00	120.360.000,00	100,00	100,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.963.900,00	978.676.688,00	99,16	100,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.253.900,00	297.874.455,00	99,54	100,00
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	639.300.000,00	632.587.233,00	98,95	100,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.950.000,00	24.815.000,00	99,46	100,00
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.460.000,00	23.400.000,00	99,74	100,00
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik		7.868.107.040,00	7.826.318.594,00	99,47	100,00
	1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.868.107.040,00	7.826.318.594,00	99,47	100,00
	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	244.635.500,00	243.968.850,00	99,73	100,00

	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	843.801.100,00	834.950.202,00	98,95	100,00
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	405.717.740,00	395.043.603,00	97,37	100,00
	4	Pelayanan Informasi Publik	147.676.900,00	146.936.863,00	99,50	100,00
	5	Layanan Hubungan Media	54.228.700,00	53.038.213,00	97,80	100,00
	6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	177.322.600,00	172.633.946,00	97,36	100,00
	7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	5.994.724.500,00	5.979.746.917,00	99,75	100,00
III		Program Aplikasi Informatika	11.418.305.350,00	10.779.453.959,00	94,41	100,00
	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.500.908.400,00	8.885.313.900,00	93,52	100,00
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.500.908.400,00	8.885.313.900,00	93,52	100,00
	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.917.396.950,00	1.894.140.059,00	98,79	100,00
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	551.866.700,00	551.292.362,00	99,90	100,00
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	372.361.850,00	361.452.170,00	97,07	100,00
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	438.399.400,00	431.126.900,00	98,34	100,00
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	554.769.000,00	550.268.627,00	99,19	100,00
IV		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	428.423.800,00	427.205.098,00	99,72	100,00

	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	428.423.800,00	427.205.098,00	99,72	100,00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	316.396.400,00	316.178.152,00	99,93	100,00
	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	112.027.400,00	111.026.946,00	99,11	100,00
V		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	418.920.200,00	414.803.509,00	99,02	100,00
	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.397.900,00	294.769.763,00	98,78	100,00
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	174.385.300,00	173.921.000,00	99,73	100,00
	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	124.012.600,00	120.848.763,00	97,45	100,00
	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	120.522.300,00	120.033.746,00	99,59	100,00
	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	120.522.300,00	120.033.746,00	99,59	100,00
		JUMLAH	28.586.806.264,00	27.357.025.071,10	95,70	100,00

Bab ini menggambarkan semua pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja strategik (Renstra).
2. Pengukuran kinerja dalam laporan dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
3. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap sasaran yang mencakup 2 indikator kinerja utama setingkat outcome dikategorikan sangat baik dengan tingkat capaian di atas 90 %. Dari hasil evaluasi kinerja secara mandiri (*self assesment*), pencapaian sasaran semuanya masuk kategori sangat baik, karena mencapai rata-rata persentase di atas 90 % untuk setiap capaian indikator kinerja utama.

Demikian LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini kami susun, semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja organisasi.

Muara Enim, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Muara Enim

